

EKSISTENSI BMT DI TENGAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(STUDI KASUS PADA BMT SINAR SURYA KOTA MAKASSAR)



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
IFA MUSDALIFAH
NIM: 10200111029
MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifa Musdalifah

Nim : 1200111029

Tempat/Tanggal Lahir : Batukaropa/21 September 1993

Alamat : Jl. Villa Mutiara, Asri IX Nomor 21 Kel. Bulorokeng Kec.

Biringkanaya kota Makassar.

Judul : Eksistensi BMT di Tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN

(Studi Kasus Pada BMT Sinar Surya Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Maret 2016

Penulis,

Ifa Musdalifah
Nim: 10200111029

PENGESAHAN SKRIPSI

Sekelompok mahasiswa "KEMENTERIAN RIPT DI TINGKAT MASYARAKAT EKONOMI
MUDA" (Studi Kasus Pada BMT Alauddin Makassar), yang disusun oleh anggota
Dik. Masyarakat, 1991 : 1999/1999, oleh dosen Fakultas Islam, Fakultas Ekonomi
dan Sosial Islam, UIN Alauddin Makassar, telah siap dan dipersembahkan dalam rangka
menyempurnakan yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 1999 M, disetujui oleh dosen
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Islam (S.I), tanpa terikat
kelebihan/kekurangan.

Makassar

14 Mei 1999 M

Prof. Dr. H. Alauddin M. Idris

REKTOR UIN ALAUDDIN

1965

Nama

Nomor

Program

Program II

Program III

Program IV

Prof. Dr. H. Alauddin M. Idris

Prof. Dr. H. Alauddin M. Idris

Prof. Dr. H. Alauddin M. Idris

Prof. Dr. H. Alauddin M. Idris

Prof. Dr. H. Alauddin M. Idris

Prof. Dr. H. Alauddin M. Idris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Diketahui oleh

Prof. Dr. H. Alauddin M. Idris dan Prof. Dr. H. Alauddin M. Idris

Prof. Dr. H. Alauddin M. Idris
RIP, 1999/1999, 1999/1999

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. wb.,

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Eksistensi BMT di Tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus Pada BMT Sinar Surya Makassar)”**. Salam dan salawat tetap tercurah kepada Rasulullah Saw. karena perjuangan beliau sehingga Islam masih eksis hingga sekarang ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dengan gelar sarjana Ekonomi Islam (S.EI) pada program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak terutama Bapak Mustafa dan Ibunda Hj. Nurliati selaku orang tua tercinta, yang sungguh penulis tak mampu membalas setiap pengorbanannya selama ini, yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati. Pada kesempatan baik ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, dan III, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Rahmawati Muin, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Drs. Thamrin Logawali, M.H selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Drs. Abdul Rasyid E, M.H selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari membuat proposal hingga rampungnya skripsi ini.
6. Sirajuddin, S.El, M.E selaku Pembimbing II yang dapat meluangkan segenap waktu dan memberikan ilmu pengetahuan, arahan serta petunjuk mulai dari membuat proposal hingga rampungnya skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, selama penulis melakukan studi.
8. Para staf dan karyawan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
9. Pemimpin Kantor BMT. Sinar Surya Makassar atas pemberian izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di kantor beliau. Hal yang sama juga penulis sampaikan kepada responden yang telah membantu menjawab beberapa pertanyaan wawancara yang di ajukan penulis. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan oleh Allah Swt.

10. Seluruh keluarga besar penulis, teristimewa kepada sepupu-sepupuku tersayang Adil, Arna, Ima, Ancy, yang telah memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis.
11. Teman-teman dan sahabat angkatan 2011, terkhusus pada ekonomi Islam kelas 1.2 yang memberikan banyak motivasi, bantuan dan menjadi teman diskusi yang baik bagi penulis. Sahabat sekaligus teman jalan-jalan penulis yang paling gila Indah, Efi, Ina, Arifa, selain itu teman seperjuangan Fitri, Niar, Nia, Syarifah, Tuti, dan sahabat lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah menjadi partner terbaik, siap membantu jika dalam kesulitan, menemani suka dan duka, memberikan semangat, semoga persahabatan kita akan tetap terjaga selamanya.
12. Keluarga besar KKN reguler angkatan ke-50, terkhusus posko Kalosi Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap, Ibu Asmuni selaku Ibu posko dan saudara-saudara seataap di posko Wandy, Ardi, Hajir, Rijal, Idah, Firah, Yanti, terima kasih telah menjadi partner terbaik selama ber-KKN.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca.

Makassar, Maret 2016

Ifa Musdalifah
Nim: 10200111029

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Ekonomi Islam	12
B. Lembaga Keuangan Syariah	24
C. Keuangan Mikro (<i>Microfinance</i>)	34
D. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).....	44
E. Negara-Negara Anggota ASEAN	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	50
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	50
B. Sumber Data Penelitian.....	51
C. Metode Pengumpulan Data.....	52
D. Instrumen Penelitian.....	53
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro BMT Sinar Surya	

Makassar Dalam Menghadapi MEA.....	63
C. Analisis Data Hasil Penelitian.....	70
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78
RIWAYAT HIDUP.....	80



ABSTRAK

Nama : Ifa Musdalifah

Nim : 10200111029

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Eksistensi BMT di Tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus pada BMT Sinar Surya Makassar)

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah BMT Sinar Surya Makassar mampu bersaing di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah BMT Sinar Surya Makassar yang beralamat di Jl. Paropo II Kecamatan Panakkukang kota Makassar mampu bersaing dan menunjukkan eksistensinya di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, dengan analisis *non statistic*. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini yaitu pengelola BMT Sinar Surya, anggota dari BMT Sinar Surya, dan masyarakat umum. Data sekunder pada penelitian ini yaitu data-data perusahaan yang di butuhkan untuk penelitian ini, selain itu buku-buku, jurnal, artikel, koran, brosur, skripsi, serta dari *website* yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa BMT Sinar Surya Makassar belum mampu untuk bersaing di tengah masyarakat ekonomi ASEAN dikarenakan masih memiliki beberapa kendala, salah satu kendala yang paling besar yaitu dana yang ada masih sangat minim, dan belum mampu memberikan pinjaman yang besar kepada nasabah/anggota yang ingin membuka usaha, dikarenakan dana yang terkumpul masih dari simpanan anggota, dan sedikit dari bank.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah BMT Sinar Surya Makassar belum mampu bersaing di tengah masyarakat ekonomi ASEAN karena masih terkendala dengan dana yang masih sangat sedikit sehingga belum mampu memberikan pinjaman yang besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan Asia Tenggara memiliki organisasi regional yang bernama ASEAN. ASEAN didirikan pada tahun 1967 dengan fokus pada isu keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari lima negara pendiri, yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand, kini ASEAN terdiri dari sepuluh Negara yang bergabung kemudian, yakni Brunei Darussalam bergabung pada tahun 1984, Vietnam bergabung pada tahun 1995, Myanmar dan Laos bergabung pada tahun 1997, serta Kamboja bergabung pada tahun 1999.¹

Keinginan ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) didorong oleh perkembangan eksternal dan internal kawasan. Dari sisi eksternal, Asia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi baru, dengan disokong oleh India, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN. Sedangkan secara internal, kekuatan ekonomi ASEAN sampai tahun 2013 telah menghasilkan GDP sebesar US\$ 3,36 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 5,6 persen dan memiliki dukungan jumlah penduduk 617,68 juta orang.²

Guna menyambut era perdagangan bebas ASEAN di ke-12 sektor yang telah disepakati, Indonesia telah melahirkan regulasi penting yaitu UU Nomor 7 Tahun

¹ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, Artikel Edisi ke-19, 2010, h. 2.

² Humphrey Wangke, "*Peluang Indonesia Terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN*". h. 5.

2014 tentang Perdagangan yang telah diperkenalkan ke masyarakat sebagai salah satu strategi Indonesia membendung membanjirnya produk impor masuk ke Indonesia. Undang-undang ini antara lain mengatur ketentuan umum tentang perijinan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan agar menggunakan bahasa Indonesia didalam pelabelan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Melalui UU ini pula pemerintah diwajibkan mengendalikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian menentukan larangan atau pembatasan barang dan jasa untuk kepentingan nasional misalnya untuk melindungi keamanan nasional.³

Pengelolaan terhadap ekonomi negara merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Restrukturisasi sebagai elaborasi dari pelaksanaan kebijakan terhadap ekonomi yang sudah dilakukan dengan evaluasi yang akan dilakukan. Kebijakan terhadap ekonomi bangsa membutuhkan sebuah proses yang komprehensif dalam perkembangannya, karena secara parsial, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakatnya. Dibutuhkan sebuah restrukturisasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya, bagi sumber daya manusia di dalamnya, infrastruktur maupun sarana penunjang lainnya. Tentunya

³Humphrey Wangke. "Peluang Indonesia Terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN" . *Jurnal Hubungan Internasional*, volume 6, nomor 10, mei 2014..h. 6.

orientasi utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan bagi seluruh ummat manusia.⁴

Mempercepat pertumbuhan ekonomi ada banyak hal yang menjadi jalan keluar agar dapat memacu percepatan tersebut, mulai dari melakukan pembenahan internal kondisi perekonomian disuatu negara bahkan sampai melakukan kerjasama internasional dalam segala bidang untuk dapat memberikan kontribusi positif demi percepatan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya dan faktor daya modal. Lalu kita dapat melihat bagaimana kelima faktor tersebut sudah secara maksimal dikelola, faktanya ada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang masih terbelakang dalam pengelolaan beberapa faktor tersebut walaupun kita juga dapat melihat beberapa negara lainnya sudah cukup mampu mengelola dengan baik. Jika melihat bagaimana Indonesia mengelola kelima faktor tersebut, beberapa faktor masih belum dapat dimaksimalkan, untuk itu Indonesia dan sembilan negara lainnya membentuk *ASEAN Community 2015* atau Komunitas ASEAN 2015 dengan tujuan yang baik. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Indonesia dan sembilan negara

⁴Hayat, “*Globalisasi perbankan Syariah : tinjauan teoritis dan praktis dalam menghadapi MEA 2015*”. Hunafa : Jurnal studia Islamika. Volume 11.Nomor 2.Desember 2014.h. 299-300.

anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC).⁵

Indonesia sebagai salah satu bagian dalam integrasi MEA tentu harus bersiap menghadapi era bebas tanpa batas ala MEA ini. Perekonomian Indonesia secara nasional diharapkan dapat terus tumbuh dengan baik untuk menunjang persaingan di kawasan ASEAN. Industri ekonomi dan lembaga keuangan syariah sebagai bagian struktur perekonomian bangsa Indonesia juga tidak lepas dari tuntutan. Namun, realita yang ada adalah bahwa sebagian pihak masih mengkhawatirkan hadirnya MEA sebagai sebuah ancaman karena pasar potensial domestik akan diambil oleh pesaing dari negara lain. Padahal, Kekhawatiran tersebut sesungguhnya tidak beralasan jika memang kita mampu menunjukkan daya saing yang tinggi.

Negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan industri dan keuangan syariah di ASEAN bahkan dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangatlah besar, diantaranya:

1. Jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah.

⁵<http://www.academia.edu> (diakses pada 30 Mei 2015)

2. Prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi kisaran 6,0%-6,5% yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid.
3. Peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah.
4. Memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah. Sehingga Indonesia melalui industri keuangan dan perbankan syariahnya akan mampu bersaing dalam kanca MEA.⁶

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri moderen. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.⁷

⁶Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia : Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015. Jurnal Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)*. 13 April 2012. h. 1.

⁷Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (UII Press, Yogyakarta: 2004), h. 51.

Salah satu masalah kronis yang banyak menyita perhatian dunia adalah mengenai kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasannya.⁸

Bagi Indonesia sekarang ini, terselenggaranya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 memberikan dampak yang cukup besar. Dampak tersebut tidak hanya terjadi pada komoditi atau jasa atau produk industri skala besar tetapi juga sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).⁹

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Diakui secara luas bahwa UMKM sangat penting dikarenakan karakteristik-karakteristik utama mereka yang membedakan mereka dari usaha besar, terutama karena UMKM adalah usaha-usaha padat karya, terdapat di semua lokasi terutama dipedesaan, lebih

⁸Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta: 2009), h. 2.

⁹Ririn Nopiah, “Implementasi Integritas dan Kreativitas Pemuda Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Melalui Optimalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. <http://economicsririn.blogspot.co.id/2015/05/nsnc640-14.html>. (diakses 30 september 2015).

tergantung pada bahan–bahan baku lokal, dan penyedia utama barang–barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin.¹⁰

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga sudah merambah di kota Makassar hal ini terbukti dengan adanya pertemuan walikota-walikota se-ASEAN untuk menandatangani deklarasi Makassar atau yang di kenal dengan *ASEAN Mayors Forum* (AMF) yang berlangsung pada tanggal 9 September 2015. Walikota se-ASEAN menandatangani nota kesepahaman dalam bentuk Deklarasi Makassar di Sheraton Hotel Makassar, Jl. Landak Baru Makassar. Dengan hadirnya deklarasi pemimpin walikota se-ASEAN yang membahas pula tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN maka tanpa disadari Makassar betul-betul sudah memasuki rana masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat ASEAN sudah bisa menjadi tenaga kerja Regional Makassar yang tanpa disadari akan menggeser tenaga kerja dalam regional Makassar.

Islam adalah Agama *Rahmatan Lilalamin* bagi seluruh umat manusia, semua aspek kehidupan baik itu politik, hukum, ekonomi semuanya ada landasannya pada al-Qur'an dan sunnah Rasul. Landasan ekonomi Islam dapat kita lihat bahwa kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah Swt. sebagaimana dalam QS. an-Nisa/4; 29:

¹⁰Tulus T.H, Tambunan, “*Pasar Bebas ASEAN : Peluang, Tantangan dan Ancaman bagi UMKM Indonesia*”, (Kementrian Koperasi UMKM, Jakarta: 2012). h. 34.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٥٨﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah menjelaskan mengenai eksistensi BMT di tengah masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) khususnya pada BMT Sinar Surya Makassar. Hal ini mengingat bahwa lembaga keuangan mikro di Indonesia merupakan perekonomian yang cukup dominan dari sekelompok usaha yang dimiliki masyarakat Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa pencapaian target kesuksesan MEA akan dipengaruhi oleh kesiapan dari lembaga keuangan mikro itu sendiri. Adapun penelitian dilakukan dengan cara menggunakan literatur dan kajian pustaka, selain itu dilakukan dengan metode wawancara dengan informan yang dianggap memiliki informasi yang luas terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini bermaksud untuk melakukan sebuah kajian mendalam untuk mengetahui sejauh mana BMT dapat bersaing di tengah masyarakat ekonomi ASEAN ini, khususnya pada koperasi BMT di Makassar, yang dilakukan pada koperasi BMT Sinar Surya yang beralamat

di Jl. Paropo II kota Makassar, apakah mampu bersaing di tengah masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan memahami masalah yang terkait dengan eksistensi BMT di tengah masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) khususnya pada BMT Sinar Surya Makassar. Oleh karena itu dalam penelitian ini dibutuhkan informasi yang luas untuk memperjelas hasil penulisan dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan adalah: Apakah lembaga keuangan mikro BMT Sinar Surya kota Makassar mampu bersaing di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ?

D. Kajian Pustaka

Untuk menunjang landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penyusunan rencana penelitian ini:

1. Suryanto dan Zaenal Muttaqin (2014), dalam penelitiannya yang berjudul *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (microfinance) dalam Pengembangan Perekonomian Jatinagor Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015*. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu pengusaha bisa membuka diri dan memanfaatkan keterbukaan pasar Jatinagor dengan adanya MEA, hanya saja perlu persiapan lebih baik, koperasi bisa tetap menjadi lembaga keuangan

mikro yang mendukung perekonomian masyarakat menengah dan kecil dalam pasar Jatinagor, dengan syarat sistem keuangan koperasi terafiliasi langsung dengan sistem perbankan nasional. Dengan kata lain, kinerja koperasi dibawah pengembangan dan pembinaan perbankan. Dengan afiliasi ini, negara akan mampu mendeteksi dan melakukan proteksi manakala terjadi kemacetan-kemacetan aliran finansial. Sistem koperasi pun akan menjadi lebih kuat karena didukung oleh dana negara.

2. Ari Anggarani Winandi Prasetyoning Tyas dan Vita intan Safitri (2014), dalam penelitiannya yang berjudul *Penguatan Sektor UMKM Sebagai Strategi Menghadapi MEA*. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dalam rangka penguatan UMKM, kerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan hal yang tepat. Namun, apabila hanya dengan LKMS kekuatannya belum begitu besar, dan sebaiknya hal ini melibatkan peran Pemerintah melalui BUMN. Adanya kesinergisan antara tiga aspek tersebut perekonomian Indonesia diharapkan dapat bertahan dalam menghadapi goncangan krisis dan bisa melibatkan partisipasi seluruh masyarakat terutama dalam hal pengembangan dan pembiayaan UMKM.

Dari beberapa penelitian terdahulu, memang seutuhnya tidak terlalu mirip dengan judul penelitian yang akan dikaji penulis dalam skripsi ini, akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu tersebut lah yang menjadi bahan acuan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang keberadaan lembaga keuangan mikro khususnya BMT di tengah masyarakat ekonomi ASEAN di kota Makassar.

Perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di kaji dari penulis yaitu dari beberapa penelitian terdahulu mengkaji tentang potensi dan strategi penguatan lembaga keuangan mikro dalam menghadapi MEA, sedangkan penulis ingin mengkaji bagaimana keberadaan lembaga keuangan mikro BMT dalam masyarakat ekonomi ASEAN ini khususnya pada BMT Sinar Surya Makassar, apakah mampu bersaing atau malah tenggelam di balik lembaga keuangan makro di tengah masyarakat ekonomi ASEAN.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengumpulkan informasi, memahami, mengkaji dan pada akhirnya mengetahui apakah Koperasi BMT Sinar Surya mampu bersaing di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini berguna pada perkembangan ilmu pengetahuan tentang keberadaan BMT dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
2. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi penerus dan atau menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut.
3. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca tentang eksistensi BMT dalam menghadapi pasar global masyarakat ekonomi ASEAN.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ekonomi Islam

Aktifitas ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Ia telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia, Nabi Adam As dan Hawa ke permukaan bumi. Perkembangan ekonomi manusia dan pengetahuan yang dimiliki. Pembagian kerja sebagai sebuah aktifitas ekonomi telah ditemui sejak generasi pertama keturunan Nabi Adam As dan Hawa. Pembagian kerja paling tua dalam sejarah umat manusia adalah antara melakukan pekerjaan berhubungan dengan binatang peternak dan pertanian. Peternak diwakili oleh Habil dan petani diwakili oleh Qabil.¹¹

Seiring perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplit. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan mereka melakukan kegiatan tukar menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya menyediakan banyak komoditas tidak bisa lagi diandalkan. Akhirnya muncullah aneka transaksi mulai barter hingga yang paling modern, seperti yang kita rasakan hari ini.

Secara umum kegiatan ekonomi dapat di bagi menjadi tiga macam, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam dunia moderen, dikenal adanya intermediasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, semuanya ini tergantung pula pada

¹¹Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002), h. 1.

kepada tenaga kerja, sumber daya alam, manajemen dan lain sebagainya. Kesemuanya ini membentuk sebuah sistem yang rumit yang biasa disebut dengan kegiatan ekonomi. Sistem ini memiliki satu tujuan utama yaitu kesejahteraan manusia. Bila sistem ini kacau, maka dipastikan kehidupan manusia akan kacau pula.¹²

1. Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikononomia*, yang terdiri dari dua kata: *oikos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat, maupun rumah tangga negara, yang dalam bahasa Inggris disebut *economics*.¹³

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah terdapat pengertian menurut beberapa ahli ekonomi Islam diantaranya :

- a. Yusuf Qardhawi, “pengertian ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari’at Allah”.

¹²Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007), h. 2.

¹³Abdullah zaky al-kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (PT. Pustaka Setia Pertama Maret, Bandung: 2002), h. 18.

- b. M Syauqi Al-Faujani, “ekonomi Islam merupakan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi”.
- c. Ziauddin Ahmad, “ekonom yang berasal dari Pakistan ini merumuskan pengertian ekonomi Islam merupakan upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai petunjuk Allah Swt. untuk memperoleh ridha-Nya”.¹⁴

Islam membedakan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Dalam definisi umum, sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis. Jadi sistem dapat didefinisikan sebagai setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya.¹⁵

2. Sejarah Ekonomi Islam

Sepanjang sejarah umat muslim, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Nabi Saw. tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga-harga itu membumbung tinggi.

¹⁴Surya pos, *Pengertian Ekonomi Islam*, <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam-html>. (diakses 30 juli 2015).

¹⁵M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*. (Al-Azhar Press, Bogor: 2009), h. 13.

Ketidaksediaanya itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah. Lebih dari itu, Nabi Saw. berusaha dengan sungguh-sungguh memperkecil kesenjangan informasi di pasar, beliau menolak gagasan untuk menerima para produsen pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui dengan benar apa yang terjadi di sana. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli dalam perdagangan, sehingga beliau menyamakan kedua hal tersebut dengan dosa-dosa paling besar dan kekafiran. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبِعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْقُوا السَّلَعَ حَتَّى يُهْبِطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ (صحيح البخار)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah sebagian kalian menjual diatas jualan sebagai yang lain dan janganlah pula kalian menyongsong dagangan hingga dagangan itu sampai di pasar. (HR. Bukhari).¹⁶

Sekalipun Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjual, membeli dan yang menjadi keinginan hatinya, tetapi Islam menentang dengan keras sifat *ananiyah* (egois) yang mendorong sebagian orang dalam ketamakan pribadi

¹⁶Ahmad Ibnu Ali Asy-Syafi'i, *Kitab Buyuu'*, (Darul.Kutub al-Islamiyah, Beirut, Libanon: 2002), h. 176.

untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperkaya pribadi, kendati dari bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat.

Setelah masa Nabi Saw. dan selama perjalanan sejarah Islam, umat Muslim mempertahankan prinsip kebebasan yang senantiasa dilaksanakan. Bahkan konsep pengendalian perilaku moral di pasar itu dilaksanakan oleh Nabi sendiri.

Ibnu Taimiyyah untuk menulis bukunya, *al-Hasbih fi al-Islam*, untuk menunjukkan bahwa kebebasan ekonomik individual harus dibatasi dalam hal-hal serupa itu, termasuk pembatasan-pembatasan dalam penentuan harga barang-barang dan jasa. Kebebasan ekonomi yang dimaksudnya, Ibnu Taimiyyah secara meyakinkan mencoba memberikan pernyataan tegas bahwa setiap individu sepenuhnya berhak menyimpan harta milik mereka, dan tidak ada seorang pun berhak mengambil semua atau sebagian daripadanya tanpa persetujuan mereka secara bebas.¹⁷

Setelah perang dunia kedua, muncul gejala yang menarik di negara-negara Islam atau negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, yaitu adanya kecenderungan untuk melihat potensi diri dengan melihat nilai-nilai Islam agar dapat dipergunakan untuk mengatur hidup dan kehidupan mereka dalam bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Sejak awal tahun 1970-an, kalangan cendekiawan Muslim berupaya menggali nilai-nilai Islam yang selama masa penjajahan Barat tertutup oleh nilai-nilai lain atau

¹⁷Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007), h. 3-4.

¹⁸Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (UI Press, Jakarta: 1988), h.

karena sebab tertentu tidak dapat dipergunakan. Untuk keperluan itu pula maka pada tahun 1972, di Amerika Serikat, lahir *The Association of Muslim Social Scientist* yang di singkat AMSS atas prakarsa *The Muslim Students Association of the United States and Canada* (MSA). Organisasi ini dalam setiap pertemuannya yang berlangsung setahun sekali, membicarakan berbagai konsep yang berhubungan dengan sistem ekonomi, sosial, dan pendidikan menurut ajaran Islam.

Pada tahun 1977 di London juga diadakan *International Economic Conference on the Muslim world and the Future Economic Order*. Di antara pokok-pokok pembahasan yang dikaji adalah konsepsi Islam mengenai susunan ekonomi dunia, tujuan dan strategi pembangunan ekonomi untuk dunia Islam, zakat dan keadilan sosial, dan dalam kerangka ajaran Islam, peranan bank pembangunan Islam dalam susunan ekonomi di masa depan, dan susunan ekonomi dunia yang adil sebagai peranan dan sumbangan Islam.¹⁹

Kegiatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan ajaran ekonomi Islam, bukan hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga di Indonesia. Pada awal Juli tahun 1982, di Ujung Pandang saat ini Makassar di selenggarakan suatu pertemuan untuk membicarakan sistem ekonomi Islam.²⁰

¹⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007), h. 7-8.

²⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007), h. 9.

3. Landasan Ekonomi Islam

Dalam filsafat ilmu, ilmu atau sains dibagi dalam tiga bagian, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi.²¹ Epistemologi adalah makna ilmu yaitu tentang seluk beluk ilmu itu sendiri, apa kemampuan dan keterbatasannya. Aksiologi adalah segigunalaksana dari ilmu, yakni hal-hal yang berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.²²

Ditinjau dari aspek ontologi, ekonomi konvensional menggunakan landasan filsafat yang berdasarkan pada pengalaman dan kajian empiris atau hanya mengandalkan ayat-ayat kauniyah saja artinya, hanya mengandalkan apa yang berwujud yang ada di sekelilingnya, dan lebih percaya terhadap apa yang dilihat seperti kejadian maupun peristiwa yang ada di alam ini dan tidak percaya kepada petunjuk Tuhan.

Ilmu ekonomi konvensional yang mendorong untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah *Self-Interest* artinya, apa yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam Islam yang menjadi pendorong adalah kehendak Allah (*God-Interest*) yaitu dalam rangka mengabdikan dan mencari ridha Allah Swt.²³ yang menjadi pedoman utama ekonomi Islam adalah petunjuk Allah berupa wahyu (al-Quran), *al-Sunnah*, *Qiyas*, *Ijma* dan *Ijtihad*, serta ayat-ayat kauniyah yang

²¹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (UI Press, Jakarta: 1988), h. 4.

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman pembukuan dan Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Islam pada Perguruan Tinggi Agama Islam* dalam Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007), h. 9.

²³Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta: 2007), h. 10.

bertebaran di jagad raya. Penggunaan ayat-ayat kauniyah, umat Islam harus hati-hati, karena dorongan hawa nafsu, sering kali manusia banyak tertipu oleh penglihatan, pendengaran dan akal sehingga melenceng dari kebenaran wahyu.²⁴

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah seperangkat ajaran Islam yang menjadi acuan segala aktifitas ekonomi yang dilakukan umat manusia. Mengacu pada pengertian bahwa ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, maka terdapat beberapa prinsip di dalamnya, yakni sebagai berikut.²⁵

a. Prinsip Tauhid

Tauhid dalam bahasa Arab “*al-tauhid*”, kata benda verbal berasal dari kata kerja *wahhada-yuwahhidu* yang berarti *infrada binafs-munfaridan*,²⁶ menyendiri dengan sendirinya, atau Esa dan tiada mendua dengan-Nya.

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah”, dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain Allah”²⁷ karena Allah pencipta alam semesta dan isinya²⁸ dan sekaligus pemiliknya, termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena

²⁴Sulaiman Thahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*, (Al-Ma’arif, Bandung: 1985), h. 29.

²⁵Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Alauddin University Press, Makassar: 2011), h. 11.

²⁶Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*.

²⁷*Maqdis, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan Hadis*, (QS al-Baqarah: 107), h. 17.

²⁸*Maqdis, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan Hadis*, (QS al-An’am: 2), h. 128.

itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya.²⁹ Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dalam alam dan sumber daya serta manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

Prinsip tauhid dalam kaitannya dengan *hablun minallah* merupakan prinsip usaha ekonomi yang mendatangkan keuntungan sangat besar. Dalam konteks ini, Allah menawarkan keuntungan dengan sesuatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian.

Quraish Shihab menyimpulkan bahwa prinsip dasar ajaran Islam adalah pada keyakinan tauhid. Dari sinilah lahir prinsip-prinsip yang bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat.³⁰

b. Prinsip Adil

Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan

²⁹Maqdis,Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan Hadis, (QS al-Dzariyat: 56). h. 523.

³⁰Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Alauddin University Press, Makassar: 2011), h. 12.

untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terbagi-bagi dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.³¹

c. Prinsip Nubuwwah

Manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) kepada Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir Zaman, Nabi Muhammad Saw. sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya adalah sebagai berikut:

1. *Sidiq*, yaitu sifat benar, jujur, mencapai tujuan yang tepat, benar dan efisiensi melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran.

³¹Maqdis, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan Hadis*, (QS Al-Fajr: 20), h. 593.

2. *Amanah*, yaitu tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas, jika tidak dilandasi saling percaya antar anggotanya, tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.
3. *Fathonah*, yaitu kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas, implikasi ekonomi dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, karena bertanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan bisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan.
4. *Tabligh*, yaitu komunikasi, keterbukaan, pemasaran setiap Muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini jika sudah mendarah daging pada setiap muslim, maka akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar yang tangguh dan lihai. Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul.

d. Prinsip Khilafah

Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Fungsi utama dari prinsip ini yaitu untuk menjaga keteraturan interaksi (muamalah) antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

e. Prinsip Ma'ad

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah ma'ad berarti “kembali”. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: “Dunia adalah ladang akhirat”. Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (bramal saleh), namun demikian, akhirat lebih baik daripada dunia.

5. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut as-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu keimanan (*al-Dien*), ilmu (*al-'Ilm*), kehidupan (*al-Nafs*), harta (*al-Māl*) dan kelangsungan keturunan (*al-Nasl*).³²

Mashlahah dicapai hanya jika kehidupan manusia dalam keseimbangan, diantaranya mencakup keseimbangan moral dan spiritual sehingga terciptanya keseimbangan yang hakiki.

Tujuan ekonomi Islam lainnya menggunakan pendekatan seperti:

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar dia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam.

³²P3EI, *Ekonomi Islam*, h. 54.

- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.³³

Secara umum tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan *al-falah* atau kemenangan, keselamatan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Untuk mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non material (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai ajaran Islam. Berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhi larangannya agar tercipta kemaslahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya maupun untuk orang lain.³⁴

B. Lembaga Keuangan Syariah

1. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Dunia telah mengalami polarisasi dari dua kekuatan sistem ekonomi, ditandai dengan adanya dua negara adidaya sebagai representasi dari dua sistem ekonomi tersebut, Amerika dan Sekutu Eropa Baratnya merupakan bagian kekuatan dari sistem

³³ Ly Fairuzah Aisyah, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Busana Muslim: Studi pada CV.Azka Syahrani Collection*. (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011), h. 36.

³⁴ Anwar Abbas, *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Islam*. (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2009), h. 14.

ekonomi kapitalis, sedangkan sistem ekonomi sosialis diwakili oleh Uni Soviet dan Eropa Timur serta negara China dan Indo China seperti Vietnam dan Kamboja.

Perjalanan dua sistem ekonomi tersebut jatuh bangun, sistem kapitalis yang berorientasi pada pasar sempat hilang pamornya setelah terjadi *Hyper Inflation* di Eropa tahun 1923 dan masa depresi 1929-1933 di Amerika Serikat. Sistem kapitalis dianggap gagal dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dunia akibat dampak sistem yang dikembangkannya.³⁵

Momentum ini digunakan oleh Keynesian untuk menerapkan sistem ekonomi alternatif yang telah berkembang ideologinya dipelopori oleh Karl Marx, sistem ini berupaya menghilangkan perbedaan pemodal dari kaum buruh dengan sistem ekonomi tersentral, dimana negara memiliki otoritas penuh dalam menjalankan roda perekonomian, tetapi dalam perjalanannya sistem ini pun tidak dapat mencari jalan keluar guna mensejahterakan masyarakat dunia sehingga pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal dekade 1990-an hancurlah sistem ekonomi tersebut ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan terpecahnya negara Uni Soviet menjadi beberapa bagian.

Awal tahun 1970-an dunia seakan hanya memiliki satu sistem ekonomi yaitu ekonomi orientasi pasar dengan perangkat bunga sebagai penopang utama, negara-negara Sosialis pun bergerak searah dengan trend yang ada sehingga muncullah

³⁵Elly Nur Rohmah, *Respon Masyarakat Muslimin Mengenai Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Respon Kyai dan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*. (Skripsi Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2010), h. 24.

istilah neososialis yang sesungguhnya adalah modifikasi sistem sosialis dan perubahannya kearah sistem mekanisme pasar.³⁶

Modifikasi sistem ekonomi pasar dan neososialis yang dijalankan pasca perang dunia ke-2 menuju kearah dualisme sistem ekonomi, tetap belum mampu untuk mencari solusi dari krisis dan problematika ekonomi dunia diantaranya inflasi, krisis moneter internasional, problematika pangan, problematika hutang negara berkembang dan lain sebagainya. Disaat yang sama negara-negara dunia ketiga mengalami masalah keterbelakangan dan ketertinggalan dalam seluruh aspek, penyebab utamanya adalah negara tersebut memakai model pembangunan negara barat yang tidak selalu sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik negara dunia ketiga hingga tidak akan pernah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Bersama dengan problematika dunia tersebut, adanya suara nyaring untuk menemukan sistem ekonomi dunia baru yang dapat mensejahterakan masyarakat dunia atas dasar keadilan, dan persamaan hak.³⁷

Dekade 70-an mulailah timbul sosok ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam dalam tatanan dunia internasional, kajian ilmiah tentang sistem ekonomi Islam marak menjadi bahan diskusi kalangan akademisi di berbagai Universitas Islam, hasil kajian tersebut dalam tataran aplikatif mulai menuai hasilnya dengan didirikan *Islamic Development Bank* (IDB) di Jeddah tahun 1974 yang diikuti dengan

³⁶M. Roem Syibli, *Filosofi dan Rasional Ekonomi Islam dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, (Safiria Insani Press, Yogyakarta: 2008), h. 25.

³⁷Achmad Rizal Purnama, Menuju Sistem Ekonomi Islam, *Makalah Seminar "Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam,"* (UI Depok, Desember : 2000).

berdirinya bank-bank Islam di kawasan Timur Tengah. Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa sistem ekonomi Islam adalah Bank Islam, padahal Sistem ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, *Public Finance*, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya.³⁸

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif.³⁹

Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif

³⁸Elly Nur Rohmah, *Respon Masyarakat Muslimin Mengenai Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Respon Kyai dan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*. (Skripsi Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2010), h. 26.

³⁹Achmad Rizal Purnama, Menuju Sistem Ekonomi Islam, Makalah Seminar “*Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam*”, (UI Depok, Desember 2000).

inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.⁴⁰

2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrumen penting di hampir seluruh sistem ekonomi dunia. Bunga yang telah menjadi kewajiban bahkan menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis.

Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi. Fenomena ini telah menjadi ciri dan alat dari kehidupan bisnis dan keuangan dalam rangka menggiatkan perdagangan, industri dan aktivitas ekonomi lainnya diseluruh dunia.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam maka diharapkan munculnya lembaga keuangan yang Islami yaitu mengembangkan sistem lembaga keuangan syariah secara lebih baik lagi. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan *gharar*. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga gagal memecahkan masalah ekonomi untuk dunia ketiga.

⁴⁰ Achmad Rizal Purnama, Menuju Sistem Ekonomi Islam, Makalah Seminar “*Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam*”, (UI Depok, Desember 2000).

Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Sekarang timbul persoalan, bagaimana pandangan hukum Islam tentang lembaga dan instrumen keuangan lainnya, yang selama ini tidak ditemukan atau tidak diatur secara *limitatif* dalam teks hukum? Untuk menjawab persoalan tersebut bukanlah persoalan mudah. Sebab sebagaimana dikemukakan di atas bahwa lahirnya lembaga-lembaga dan instrumen keuangan merupakan tuntutan obyektif masyarakat.

Zaman sekarang ini, seseorang tertarik untuk mempergunakan suatu lembaga dan instrumen keuangan tentunya didasarkan kepada pertimbangan praktis, ekonomis, dan efisien. Sedangkan lembaga dan instrumen keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan hal tersebut, baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), lembaga pembiayaan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, kesemuanya ini berada di luar sistem moneter.⁴¹

a. Dasar Hukum LKS Menurut Ketentuan Hukum Islam

Setiap lembaga keuangan syariah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena

⁴¹Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2004),

itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.⁴²

al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Sistem politik misalnya dijumpai istilah *qoum* untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.⁴³

Pedoman lembaga keuangan syariah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 tentang sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahannya:

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

⁴²Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2004), h. 35.

⁴³Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 35.

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Riba berarti memberi uang ataupun barang dan mengambil kembali pada waktu yang ditentukan dengan berlipat ganda. Maka tambahan dari pokok yang diambil dari yang berhutang, tidak ada imbalannya, baik berupa benda maupun berupa usaha. Tidak pula diambil dengan dasar keridhaan si pembayar. Makin bertambah lama waktunya makin banyak pula pembayaran nantinya. Karena itu, mengambil tambahan yang tidak diridhai itu adalah riba.⁴⁴

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar mengungkapkan, tidak termasuk riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta/uang untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah satu pihak tanpa satu dosa kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan. Tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Tuhan dan tidak pula kemudian dalam pandangan seorang yang berakal atau berlaku adil.⁴⁵

⁴⁴Elly Nur Rohmah, *Respon Masyarakat Muslim Mengenai Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Respon Kyai dan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, h. 41.

⁴⁵Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar Jilid III*, (Dar al-Manar, Mesir: 1376 H), h. 113-114.

b. Dasar Hukum LKS Menurut UUD 1945

Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 adalah landasan dasar bahwa seluruh syariat Islam, khususnya yang menyangkut bidang-bidang hukum muamalat, dapat dijalankan secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan diadopsi dalam hukum positif nasional. Keberhasilan upaya warga bangsa untuk maksud ini ditandai oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, dan bank-bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Keberadaan bank syariah lebih diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang no. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah (pasal 1 angka 7 dan pasal 11). Landasan hukum ini menjamin adanya tertib hukum bahwa di Indonesia disepakati penerapan sistem perbankan ganda atau *dual banking system*, yaitu penggunaan perbankan konvensional dan perbankan syariah yang berjalan secara paralel. Penulis berpendapat bahwa kondisi keakraban ini akan sangat berperan dalam menumbuhkembangkan investasi pada usaha-usaha yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat luas.

Kebebasan memilih yang diperankan masyarakat dalam mana pemerintah bertindak sebagai pelayannya, maka pada gilirannya setiap individu, aktor di pentas

ekonomi ini, yang bertanggungjawab kepada Tuhannya di hari kemudian tentang apa yang diamalkannya di dunia.⁴⁶

Undang-undang yang membahas tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu UU nomor 5 tahun 1999, undang-undang ini dibuat untuk mewujudkan agar setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Pasal 16 di jelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selain itu dalam pasal 17 dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha dapat dikatakan melakukan penguasaan produksi dan pemasaran apabila barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau satu pelaku usaha atau satu

⁴⁶Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Alaudin Univerity press, Makassar: 2011), h. 29-30.

kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁴⁷

Undang-undang ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. dalam sejarah ekonomi pada zaman rasulullah, Nabi Saw. berusaha dengan sungguh-sungguh memperkecil kesenjangan informasi di pasar, beliau menolak gagasan untuk menerima para produsen pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui dengan benar apa yang terjadi di sana. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli (dalam perdagangan), sehingga beliau menyamakan kedua hal tersebut dengan dosa-dosa paling besar dan kekafiran.⁴⁸

C. Keuangan Mikro (*microfinance*)

Salah satu program kebijakan pemerintah dan atau sebagai lembaga donor yang minimal memberikan dukungan terhadap pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada usaha skala kecil atau masyarakat miskin, yang dikenal dengan *microfinance* atau menurut istilah di kalangan perbankan, disebut juga sebagai kredit usaha mikro. Kredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin dengan kriteria penduduk miskin menurut Bank Indonesia dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁴⁹

⁴⁷Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33.

⁴⁸Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. (PT Raja Grafindo Persada, Cet 1, Jakarta: 2007), h. 3.

⁴⁹Budi Hermana, dkk, *Lembaga Keuangan Mikro: Model Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*, Jurnal Universitas Gunadarma, h. 2.

Keuangan mikro, termasuk lembaganya, adalah sebuah konsep yang berangkat dari pengalaman riil masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro memiliki karakteristik khusus yang sesuai dengan segmen sasarannya, yaitu:

1. Terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan, terutama simpan dan pinjam.
2. Diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana.⁵⁰

Keuangan mikro (*microfinance*) merupakan alat yang penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan.

Dalam *handbook* yang dikeluarkan bank Dunia disebutkan bahwa *microfinance* adalah penyediaan jasa keuangan bagi nasabah berpenghasilan rendah, yang umumnya berupa pemberian kredit dan menerima tabungan. Dalam konteks lembaga keuangan di Indonesia, *microfinance* biasa diterjemahkan sebagai pembiayaan mikro atau kredit mikro, yaitu aktivitas pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah berpenghasilan rendah dimana pada umumnya belum terjangkau oleh bank

⁵⁰Ridwan Saifuddin, *Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Lembaga Keuangan Mikro studi kasus BMT di Kota Lampung*, (Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2008), h. 21.

umum, seperti sektor informal, usaha rumah tangga, serta para petani kecil di pedesaan.⁵¹

Aktivitas keuangan mikro dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan mikro (*microfinance institution*) yang selama ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat, seperti *Baitul maal wat Tamwil*, koperasi simpan pinjam, bank perkreditan rakyat, lembaga swadaya masyarakat, serta berbagai kelompok arisan, selain itu BRI unit desa sebagian besar pembiayaannya juga dapat digolongkan ke dalam kredit mikro.

1. Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Secara etimologi diambil dari kosa kata *al-Maal* dan *at-Tamwil*. *al-Maal* bermakna harta kekayaan, sedangkan *at-Tamwil* berarti pertumbuhan harta itu sendiri yang sama-sama berasal dari asal kata *maal*.⁵² Pengertian lain bahwa *baitul maal* berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *al-Maal* yang berarti harta. *Baitul maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. *Baitul Maal* adalah suatu lembaga atau pihak (*al-Jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. *Baitul Maal* dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-Makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi

⁵¹Ridwan Saifuddin, *Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Lembaga Keuangan Mikro studi kasus BMT di Kota Lampung*, (Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2008), h. 18.

⁵²Hamdan, "*Baitul Māl Wattamwil dan BPR*", Makalah yang disampaikan pada Diklat III Program PPC Terpadu Angkatan VI Peradilan Agama Seluruh Indonesia di Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Megamendung Bogor tanggal 31 Agustus 2012.

pendapatan negara. Secara sederhana BMT kemudian dapat dipahami sebagai suatu lembaga keuangan, yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non-komersial, dan institusi/lembaga keuangan, yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari pihak ketiga dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan.⁵³

Istilah *Baitul Maal* sesungguhnya telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, meski saat itu belum terbentuk lembaga yang mandiri dan terpisah. *Baitul Maal* baru berdiri sebagai lembaga ekonomi tersendiri pada masa Khalifah ‘Umar bin al-Khattab atas usulan seorang ahli fiqih yang bernama Walid bin Hisyam. Sejak masa itu dan masa-masa selanjutnya yaitu masa Dinasti ‘Abbasiyah dan Umayyad, *Baitul Maal* telah menjadi lembaga yang penting bagi negara. Meski tidak semua sumber uang negara milik *Baitul Maal*, tetapi *Baitul Maal* boleh dikatakan merambah banyak urusan, mulai dari penarikan zakat, pajak, *ghanimah* sampai membangun jalan-jalan, menggaji tentara dan para pejabat negara serta membangun sarana-sarana sosial lainnya.⁵⁴

Dalam operasionalnya, BMT secara sederhana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Ciri-ciri *Baitul Maal*:

1. Visi dan misi sosial tidak bersifat komersial.

⁵³Apit Farid, *Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*, h. 4.

⁵⁴Hamdan, “*Baitul Mal wattamwil dan BPR*”, Makalah yang disampaikan pada Diklat III Program PPC Terpadu Angkatan VI Peradilan Agama Seluruh Indonesia di Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Megamendung Bogor tanggal 31 Agustus 2012.

2. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*).
3. Tidak boleh mengambil profit apapun dari operasinya.
4. Pembiayaan operasional diambil 12,5% dari total zakat yang diterima.

b. Ciri-ciri *Baitul Tamwil*:

1. Visi dan misi ekonomi.
2. Dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam.
3. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana (penabung) dengan pihak yang kekurangan dana (peminjam).
4. Pembiayaan operasional berasal dari aset sendiri atau keuntungan
5. Merupakan wajib zakat.⁵⁵

Menelisik sedikit keberadaan sumber dana BMT, dengan fungsi sebagai *baitul maal* BMT bersumber dana dari zakat, *infaq*, *shadaqah*, *hibbah*, wakaf, sumbangan, dan sumber lain yang sifat pokoknya tidak komersil yang dialokasikan kepada mereka yang berhak (*mustahiq*), yaitu fakir, miskin, mualaf, orang yang dalam perjalanan, *gharimin*, hamba sahaya, *amylin*, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sedangkan *baitut tamwil* sumber dananya dari simpanan, tabungan, saham dan lain-lain yang dialokasikan untuk kepentingan pembiayaan dan atau investasi.

Dalam menambah sumber dananya BMT mempunyai kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak swasta, BUMN dan bahkan lembaga

⁵⁵<http://www.puskopsyahlampung.com/2013/05/perkembangan-bmt-dari-tahun-ke-tahun.html>. (diakses tanggal 30 september 2015).

keuangan Bank, seperti halnya Bank Muamalat yang membuka kesempatan dengan produk pembiayaan modal kerja bagi lembaga keuangan mikro syariahnya sebagai cara bagi LKMS yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio pembiayaannya kepada Nasabah atau anggotanya.

Sedangkan dalam tataran operasionalnya, BMT menghimpun modal dengan teknis antara lain adanya Simpanan Pokok Khusus (SPK), simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, jasa sebagai usaha jasa keuangan dan *wadi'ah* pada umumnya disimpan dalam bentuk dana sosial seperti zakat infak, dan sebagainya.⁵⁶

2. Koperasi Syariah

Istilah koperasi diambil dari kata *Cooperate* bahasa Inggris yang berarti kerjasama,⁵⁷ kerjasama bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kemudian kata itulah yang dalam bahasa Indonesia secara umum diistilahkan koperasi. Koperasi dapat dipahami sebagai suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.⁵⁸

⁵⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Kharisma Putra Utama, Jakarta: 2012), h. 365-366.

⁵⁷Sukrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2000), h. 122.

⁵⁸Karta Saputra, *Koperasi Indonesia*, (Bina Aksara, Jakarta: 1985), h. 1.

Berbeda halnya dengan adanya BMT, dalam eksistensinya koperasi begitu mendapat perhatian pemerintah dari masa ke masa. Pada masa awal berkembangnya perekonomian Indonesia sering didengar dengan istilah Koperasi Unit Desa (KUD), salah satu lembaga koperasi yang langsung bersentuhan dengan rakyat di tataran bawah, juga berlandaskan hukum salah satunya adalah adanya Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Memperhatikan akan peranannya, koperasi mempunyai posisi strategis sebagai lembaga perekonomian yang berfungsi sebagai lembaga yang meringankan beban permasalahan ekonomi masyarakat kecil. Hal ini sesuai dengan fungsi koperasi sebagai:

- a. Fungsi Ekonomi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.
- b. Fungsi Sosial, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi.⁵⁹

Adapun dalam menjalankan operasionalnya, sebuah koperasi bermodal dari dana yang dihimpun dari para anggotanya berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, penghasilan hasil usaha dan sumber lain yang tidak mengikat.⁶⁰ Meskipun demikian, faktanya banyak koperasi yang memodifikasi jenis simpanan para anggotanya sesuai dengan kebutuhan bersama.

⁵⁹Sukrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2000), h. 123.

⁶⁰Sukrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2000), h. 123.

Perkembangan selanjutnya, seiring dengan bertambah populernya sistem ekonomi syariah, maka koperasi pun banyak yang beralih dari operasional konvensional menjadi koperasi syariah. Sederhananya dapat dipahami bahwa koperasi syariah adalah bentuk koperasi biasa namun dalam operasinya menggunakan prinsip syariah. Namun ada juga yang mendefinisikannya sebagai lembaga ekonomi *syirkah ta'awuniah mudharabah* yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua atau lebih, yang satu menyediakan modal, yang lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing*.⁶¹

3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sendiri dapat dipahami sebagai bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶²

Istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai Bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

⁶¹Apit farid, *Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*, h. 9.

⁶²Annonimus, *Undang-Undang RI tentang Perbankan syariah*, 2011, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011), h. 3.

Perkembangan BPR yang tumbuh semakin banyak dengan menggunakan prosedur-prosedur Hukum Islam sebagai dasar pelaksanaannya serta diberi nama BPR Syariah. BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah PT. BPR Dana Mardhatillah, kecamatan Margahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kecamatan Padalarang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kecamatan Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991.⁶³

Bank pembiayaan rakyat syariah berlatar belakang sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Sama seperti halnya BPR, BPRS dilarang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti menerima dana simpanan dalam bentuk giro sekalipun hal itu dilakukan dengan prinsip *wadi'ah*.

Berhubung BPRS termasuk kategori lembaga keuangan bank, maka payung hukumnya pun merujuk kepada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun yang lebih khusus yakni dengan adanya surat keputusan direksi bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR berdasar prinsip syariah.

⁶³<http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/bank-perkreditan-rakyat-bpr-syariah/>, (diakses tanggal 30 september 2015).

Melaksanakan operasional kegiatannya, BPRS bergerak pada penghimpunan dana dan penyaluran dana,⁶⁴ sebagaimana tertuang pada Pasal 27 SK Dir. BI Nomor 32/36/KEP/DIR/1999, yakni sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 1. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah mudharabah*.
 2. Deposito berjangka dengan prinsip *mudharabah*.
 3. Bentuk lain dari *wadiah mudharabah*.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui:
 1. Transaksi jual beli.
 2. Pembiayaan bagi hasil.
 3. Pembiayaan lain, yang menggunakan prinsip *rahn* dan *qardl*.
- c. Kegiatan lain sepanjang ada persetujuan dari dewan syariah nasional.

Lembaga BPRS ini dapat pula bertindak sebagai lembaga *Baitul Māl Wattamwil* yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan atau pinjaman kebajikan (*qardul hasan*).⁶⁵

⁶⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 2007), h. 168.

⁶⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Grafiti, Jakarta: 2007), h. 23.

D. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

1. Pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC).⁶⁶

Pertemuan KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997 Para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan social ekonomi. Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, *ASEAN Security Community* dan komunitas social budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari komunitas ASEAN. Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara kuat dalam membangun komunitas ASEAN pada tahun 2020 mendatang. Selanjutnya, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan target yang jelas dan jadwal untuk pelaksanaan.

⁶⁶Keane Syabi, *Pengertian dan Karakteristik MEA*. www.academia.edu/9060383/masyarakat-ekonomi-ASEAN-2015-MEA-2015.html. 2014. (diakses 30 Juli 2015).

Pertemuan KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para Pemimpin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN visi 2020 dan ASEAN *Concord II*, dan menandatangani deklarasi Cebu tentang percepatan pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015. Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.⁶⁷

2. Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN. Karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah:

1. Pasar dan basis produksi tunggal,
2. Kawasan ekonomi yang kompetitif,

⁶⁷Humphrey Wangke, “*peluang Indonesia terhadap masyarakat ekonomi ASEAN*”. *Jurnal hubungan internasional*, volume 6, nomor 10, mei 2014. h. 6

3. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata
4. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Karakteristik ini saling berkaitan kuat. Dengan Memasukkan unsur-unsur yang dibutuhkan dari masing-masing karakteristik dan harus memastikan konsistensi dan keterpaduan dari unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan saling mengkoordinasi di antara para pemangku kepentingan yang relevan.⁶⁸

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam melalui *Initiative for ASEAN Integration* dan inisiatif regional lainnya.

Bentuk Kerjasamanya adalah :

1. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas
2. Pengakuan kualifikasi profesional
3. Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan
4. Langkah-langkah pembiayaan perdagangan
5. Meningkatkan infrastruktur
6. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN
7. Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah.

⁶⁸Rahayu Srikandi, 2014. *Pengertian dan Karakteristik MEA*. <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/08/pengertian-karakteristik-masyarakat-ekonomi-ASEAN.html>. (diakses 30 Juli 2015).

8. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights* (IPR), *taxation*, dan *E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*.

Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar,

pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.⁶⁹

E. Negara-negara Anggota ASEAN

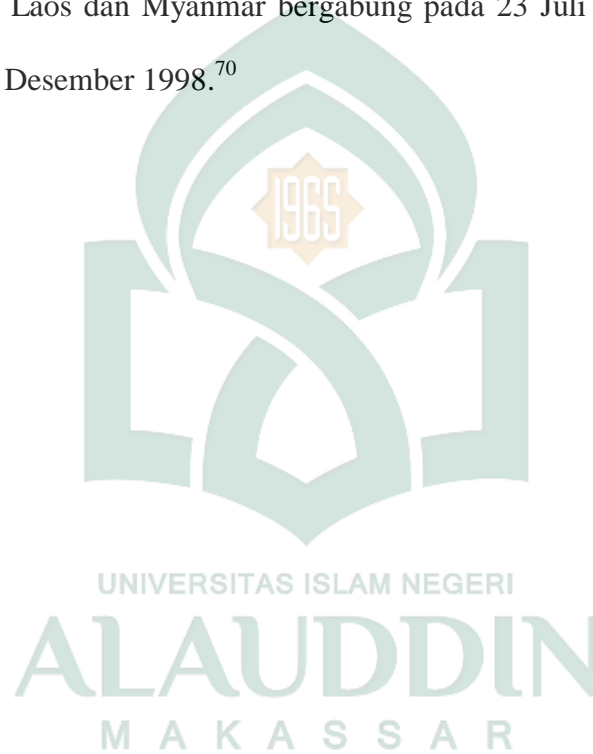
ASEAN adalah organisasi bertaraf internasional yang menaungi negara-negara yang memiliki letak geografis di Tenggara Asia. Tujuan pendirian organisasi ini difokuskan untuk pengembangan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan, serta memelihara stabilitas dan perdamaian di tingkat regional bagi negara-negara anggotanya.

Association of South East Asia Nations (ASEAN), dalam bahasa Indonesia disebut sebagai PERBARA singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan di Bangkok berdasarkan inisiatif dari lima negara

⁶⁹Keane Syabi, 2014. *Pengertian dan Karakteristik MEA*. www.academia.edu/9060383/masyarakat-ekonomi-ASEAN-2015-MEA-2015.html. (diakses 30 Juli 2015).

yang memprakarsai pada 8 Agustus 1967. Organisasi ini bersifat geo-politik dan ekonomi berdasarkan wilayah.

Negara-negara anggota ASEAN terdiri dari 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand. Sedangkan negara-negara anggota lainnya terdiri dari Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997, dan Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998.⁷⁰



⁷⁰Direktorat jenderal kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, Artikel, Edisi ke-19, 2010, h. 2.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, sebagai sumber langsung dan instrumen penelitian sendiri, yaitu penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi laporan hasil penelitian.

Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bekerja dalam aturan alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat. Dengan kata lain, penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk membuka tabir secara lebih jelas karena penelitian dilakukan secara lebih mendalam dan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan bukan dalam bentuk statistik yang berkenaan dengan pengukuran sesuatu seperti halnya pada penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka-angka dan mengutamakan penilaian sistem.⁷⁰

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, tepatnya di Koperasi BMT Sinar Surya kota Makassar yang beralamat di Jl. Paropo II Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Pengambilan daerah penelitian tersebut adalah dengan alasan kemudahan untuk mendapatkan responden, mengingat peneliti juga berdomisili di kota Makassar.

⁷⁰Sopannah. *Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sebuah Studi Interpretif*, (SNA XIII, Purwokerto: 2011).

Lokasi penelitian dapat berubah sewaktu-waktu dan disesuaikan dengan keinginan dari informan penelitian agar informan merasa nyaman.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu pengelola BMT Sinar Surya, anggota/nasabah dari BMT Sinar Surya, mahasiswa serta masyarakat umum.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian. Atau data yang berasal dari data orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen BMT Sinar Surya Makassar, buku-buku, jurnal, artikel, majalah, brosur, maupun dari *website* yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

2. Pustaka

Penelitian Kepustakaan (library Research) yaitu pengumpulan data yang menggunakan referensi dari berbagai buku literatur, jurnal, skripsi, artikel dan makalah untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Misalnya web perusahaan, laporan keuangan, gambar perusahaan, dan lain-lain. Informasi data yang diperlukan dalam penelitian ini juga kami peroleh dari studi dokumentasi. Sebelum penelitian lapangan, peneliti telah melakukan telaah terhadap buku literatur,

majalah, jurnal, hasil seminar, artikel, baik yang tersedia dalam media *on-line* (internet) maupun yang ada dalam perpustakaan.

D. Instrumen Penelitian

Sanafia Faisal dalam bukunya format-format penelitian sosial mengemukakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data suatu penelitian.⁷¹ Instrumen penelitian sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, dipandang sangat membantu seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian dan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu penelitian. Selain digunakan untuk menjawab masalah penelitian dan menguji hipotesis, instrumen juga berguna untuk mengukur tingkat kualitas data, sebaiknya disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan sebagai salah satu cara memperoleh kebenaran data sehingga sesuai dan sejalan dengan hasil penelitian. Adapun instrumen yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Telepon genggam
- b. Kamera
- c. Alat tulis

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Teknik analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

⁷¹ Sanafia Faisal, *Format-format penelitian Sosial*, Cet. V. (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001), h. 57.

analisis non statistik dengan pendekatan induktif yaitu suatu analisis data yang bertolak dari problem atau pernyataan maupun tema yang dijadikan fokus penelitian.

Penulis menempuh 3 cara dalam mengelola data penelitian ini:

- a. Reduksi data (*data reduction*) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang data yang dianggap kurang/tidak perlu. reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literature yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah.
- b. Penyajian Data (*data display*) yaitu data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana kerja selanjutnya.
- c. Verifikasi data (*conclusion drawing/verification*) yaitu penarikan kesimpulan yang sudah di sajikan, dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini dipakai untuk penentuan hasil akhir dari keseluruhan permasalahan dapat dijawab sesuai kategori data dan masalahnya. Pada bagian ini akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang mendalam secara komprehensif dari data hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Koperasi BMT Sinar Surya Makassar

Koperasi BMT Sinar Surya berdiri sejak tahun 1997, BMT Sinar Surya ini lahir berdasarkan tuntutan dan animo masyarakat yang ingin menjadikan BMT sebagai wadah untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Karena itu BMT Sinar Surya Makassar merupakan Badan Usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan yang berpolakan syariah tumbuh dan berkembang dari arus bawah berdasarkan azas *bottom up* dan bukan *top down plan*. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Sinar Surya Makassar senantiasa berupaya memperbaiki kinerja organisasi dan manajemen melalui ekspansi usaha.

Tujuan berdirinya BMT Sinar Surya Makassar adalah turut mengambil bagian dalam menjembatangi kesenjangan ekonomi yang semakin tajam, mengangkat taraf ekonomi lemah, serta menggali potensi ekonomi dikalangan ummat Islam, dimana berperan serta sebagai mitra dalam mengembangkan perekonomian ummat.

Berbagai jenis usaha yang dirintis untuk dikembangkan dan memiliki peluang / potensi pasar yang cukup besar. Ekspansi usaha yang potensial itu, diharapkan mampu menempatkan BMT Sinar Surya Makassar pada posisi strategis dan produktif, sehingga *action plan* BMT Sinar Surya Makassar mampu menjawab tuntutan kebutuhan anggota.

BMT Sinar Surya Makassar saat ini berkantor di jalan Paropo II No. 5 yang terletak di kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Pengelola saat ini pada BMT Sinar Surya Makassar sebanyak 7 orang. Dan adapun anggotanya saat ini sebanyak 687, sebanyak 67 orang anggota tetap dan 620 orang anggota aktif.

2. Visi dan Misi koperasi BMT Sinar Surya Makassar

a. Visi

Visi dari BMT Sinar Surya Makassar yaitu sebagai lembaga keuangan syariah yang kuat, bersahabat dan terpercaya dalam memberdayakan ekonomi umat di kota Makassar pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya.

b. Misi

Misi dari BMT Sinar Surya Makassar yaitu:

- 1) Mengajak umat untuk menitipkan sebagian dananya di BMT dengan rasa aman dan saling percaya.
- 2) Menyediakan pembiayaan syariah kepada anggota dalam upaya peningkatan kualitas ekonomi dan kualitas ibadah serta turut dalam pemberdayaan ekonomi ummat.
- 3) Melakukan pembinaan dan konsultasi bisnis dalam upaya penguatan dan pertumbuhan usaha.
- 4) Melakukan pembinaan keimanan dan wawasan ke Islaman terutama dalam perwujudan ekonomi syariah.

3. Struktur Organisasi BMT Sinar Surya Makassar

Baitul Maal Wattamwil Sinar Surya saat ini berkantor di jalan Paropo II No. 5 yang terletak di kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Struktur organisasi BMT Sinar Surya Makassar terdiri dari rapat anggota pendiri, pengurus, dewan pengawas syariah, manajer umum, kasir, manajer pembiayaan, penggalangan dana (pengelola dan pengurus staf operasional), dan administrasi/pembukuan.

a. Badan Pengawas Syariah

Badan pengawas BMT Sinar Surya Makassar menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pengelola agar berjalan sesuai dengan prinsip Syariah.

b. Badan Pengurus

Badan pengurus BMT Sinar Surya Makassar menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pengelola agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan amanah anggota.

c. Badan Pengelola

Badan pengelola BMT Sinar Surya Makassar direkrut berdasarkan surat keputusan badan pengurus yang mempunyai tugas untuk merealisasikan setiap jenis program usaha BMT Sinar Surya makassar. Karena itu, tingkat produktivitas usaha diukur dari kemampuan badan pengelola untuk menghasilkan *output* yang jauh lebih besar daripada *input* yang dipakai. Guna meraih target bisnis yang

dirumuskan anggota dalam rapat badan pengurus mengangkat badan pengelola sesuai dengan kebutuhan usaha.

d. Bidang Manajemen

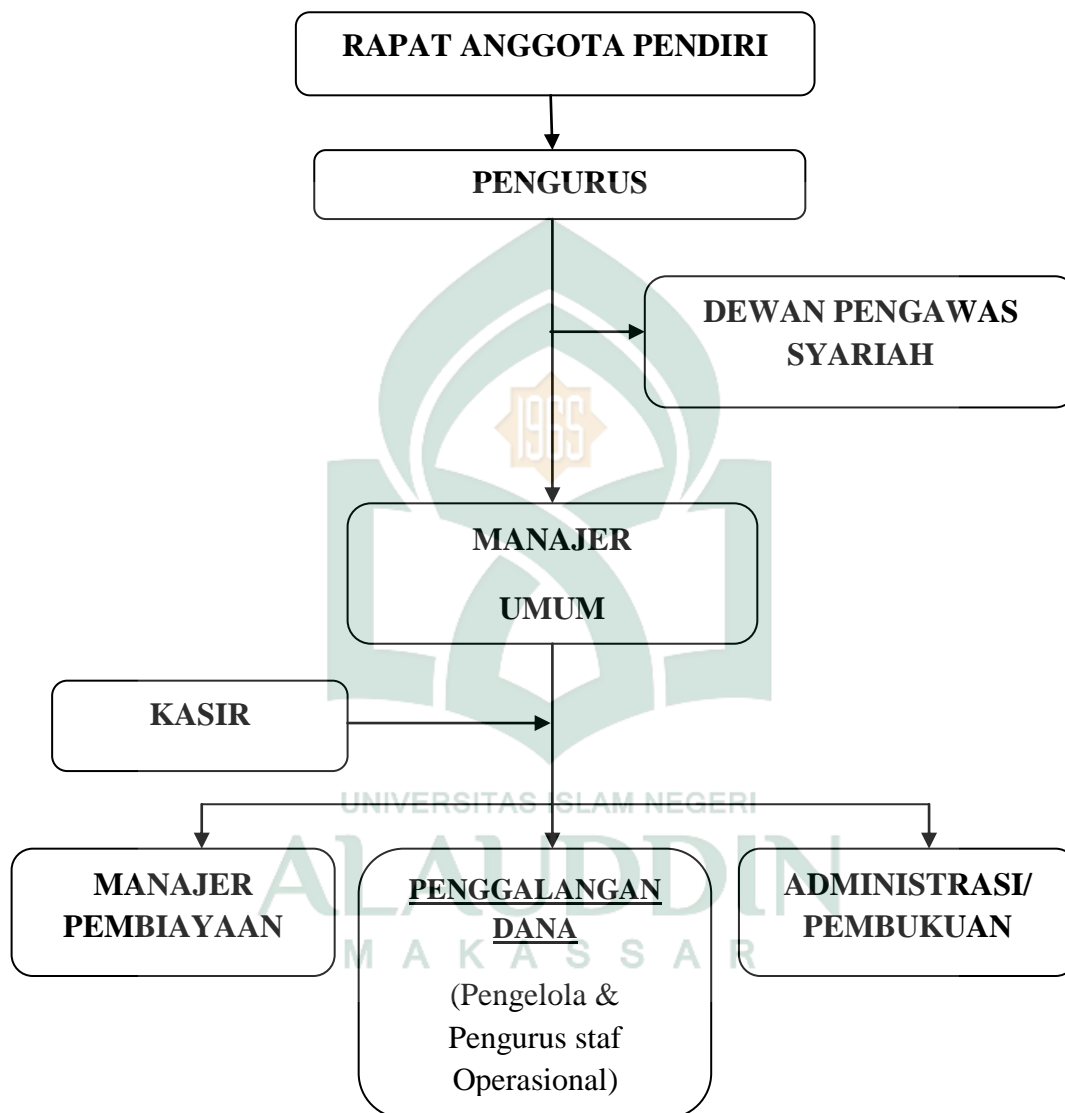
Sistem manajemen yang diterapkan oleh badan pengurus BMT Sinar Surya Makassar dalam manajemen partisipatif dengan mengutamakan peran serta anggota. Dalam hal ini BMT Sinar Surya Makassar menerapkan konsep fungsi manajemen yang dikenal dengan istilah POAC (*planning, organizing, actualing, dan controlling*). Melalui fungsi manajemen, SDM diorganisir dan didistribusi pada kinerja-kinerja yang layak dan *representative*.

e. Bidang Keanggotaan

Anggota BMT Sinar Surya Makassar terdiri dari Anggota tetap dan anggota layanan. Anggota tetap adalah yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban pada BMT Sinar Surya berupa modal pendiri, sedangkan anggota layanan adalah pihak-pihak yang telah memperoleh pinjaman dan atau menjadi mitra kerja BMT Sinar Surya Makassar. Hingga akhir tahun 2015 BMT Sinar Surya Makassar memiliki anggota tetap sebanyak 67 orang dan anggota aktif (simpanan anggota) sebanyak 620 orang.

Gambar. 1.1.

Struktur Organisasi BMT Sinar Surya Makassar



4. Bidang Usaha BMT Sinar Surya Makassar

Baitul Maal wattamwil Sinar Surya Makassar mengelola dana yang diperoleh dari simpanan anggota, dana mitra kerja, dana kredit program dari pemerintah. Adapun dana yang dikelola oleh unit simpan pinjam adalah:

- a. Simpanan Anggota / Mitra Kerja
- b. Kredit program pemerintah
 - 1) Dana PPKP Disnaker dan Trans Provinsi Sulawesi Selatan
 - 2) Dana P2KER Kerjasama Bank Muamalat cabang Makassar
 - 3) Dana PUKK Bank Mandiri cabang Makassar
 - 4) Dana Grameen Bank Disnaker dan Trans Provinsi Sulawesi Selatan
 - 5) Dana dari PKBL PLN SulselBarTra
 - 6) Dana LPDB InkopSyah Jakarta
 - 7) Dana dari pembiayaan subsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat.

Dana tersebut telah didistribusikan kepada anggota dan pihak lainnya, sistem pembayaran bulanan, mingguan, dan harian.

5. Prinsip Operasional BMT Sinar Surya Makassar

- a. Sistem bagi hasil yaitu sistem yang diberikan bagi anggota simpanan yang setiap bulannya akan diberikan berdasarkan dari saldo rata-rata dari anggota simpanan.
- b. Sistem jual beli dengan *Mark Up* (Marjin Keuntungan).
- c. Sistem *non profit*.

6. Produk-Produk BMT Sinar Surya Makassar

- a. Produk-produk pembiayaan / kredit modal kerja
 - 1) *Murabahah* (pembiayaan jual beli / *cash* tunda)
 - 2) *Mudharabah* (pembiayaan bagi hasil)
 - 3) *Musyarakah* (pembiayaan bagi hasil berserikat)
 - 4) *Qardul Hasan* (pembiayaan kebajikan)
- b. Produk-produk Simpanan dan penghimpunan dana
 - 1) Simpanan *mudharabah* yaitu, simpanan anggota yang dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja. Karakteristik simpanan *mudharabah* adalah:
 - a) Setoran / penarikannya dapat dilakukan setiap hari kerja, sesuai dengan perjanjian.
 - b) Penarikan maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam satu hari, kecuali ada pemberitahuan kepada pihak BMT Sinar Surya pada hari sebelum penarikan.
 - c) Mendapatkan pembagian laba atau bagi hasil.
 - d) Dapat mengetahui saldo simpanan setiap hari.
 - e) Dapat dijadikan jaminan kepada BMT Sinar Surya.
 - 2) Simpanan Pendidikan yaitu, simpanan anggota yang dihimpun untuk pendidikan masa depan mulai TK hingga perguruan tinggi. Karakteristik simpanan pendidikan adalah:
 - a) Hanya dapat diambil pada saat pergantian tahun ajaran baru, pergantian semester atau kenaikan kelas.
 - b) Penyetoran dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja.

c) Mendapatkan pembagian laba atau bagi hasil.

d) Berguna untuk biaya pendidikan sekolah.

3) Simpanan qurban yaitu, simpanan anggota yang dapat digunakan menjelang pelaksanaan hari raya qurban. Karakteristik dari simpanan qurban adalah:

a) Penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang pelaksanaan ibadah qurban, dibulan Dzulhijjah.

b) Penyetoran dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja.

c) Mendapatkan pembagian laba atau bagi hasil, sehingga dapat mencukupi untuk melaksanakan ibadah qurban.

d) Membantu penabung memperoleh hewan qurban yang memenuhi persyaratan syariah serta menyalurkannya kepada *mustahik*.

4) Simpanan haji yaitu, simpanan anggota yang dapat dipergunakan dalam rangka mencukupi pelaksanaan ibadah haji. Karakteristik dari simpanan haji ini adalah:

a) Penarikan dapat dilakukan pada saat anggota akan menunaikan ibadah haji.

b) Mendapatkan pembagian laba atau bagi hasil, sehingga dapat menambah bekal ke tanah suci Mekah.

c) Penyetoran dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja.

5) Deposito *Al-ashr* yaitu, simpanan berjangka yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tertentu yaitu 3,6 dan 12 bulan, serta dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*).

7. Keistimewaan dan Keuntungan Simpanan BMT Sinar Surya

- a. Sistem pengoperasiannya yang berdasarkan syariat Islam membuat para anggota merasa aman dari berbagai unsur-unsur spekulasi dan ribawi serta praktek-praktek yang tidak Islami lainnya.
- b. Dengan dana tersebut, maka kita ikut membantu pengembangan ekonomi ummat, serta usaha untuk mengentaskan kemiskinan.
- c. Turut sertanya kita dalam menyebarkan syiar Islam sebagai manifestasi dari kesadaran berislam kita.
- d. Adanya kesempatan dan motifasi bagi anda untuk mempersiapkan bekal demi keperluan masa depan.
- e. Keuntungan pembagian laba atau bagi hasil yang dapat diperoleh, yang ditambahkan pada nilai nominal simpanan.

B. Eksistensi Lembaga keuangan Mikro BMT Sinar Surya Makassar Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pemerintah sebagai penyelenggara negara pasti mengharapkan masyarakat yang makmur, sejahtera, serta dapat memenuhi semua kebutuhannya. Akan tetapi masih ada beberapa kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri sehingga membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Faktor tersebut disebabkan oleh perbedaan kondisis ekonomi, biaya produksi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, serta perbedaan selera masyarakat dan tidak semua negara dapat memproduksi sendiri barang yang dibutuhkan.

Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan perekonomian suatu bangsa adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Salah satu bentuk dari perdagangan bebas itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), negara yang tergabung dalam MEA khususnya Indonesia dituntut untuk dapat mengintegrasikan ekonomi nasionalnya menuju perdagangan bebas.

Namun yang menjadi tanda tanya besar siapkah Indonesia terutama dalam hal lembaga keuangan mikro khususnya BMT menghadapi MEA?, sedangkan ketika melihat realitas yang ada selama ini tingkat ekonomi Indonesia masih sangat rendah, masih marak PHK, pengangguran, orang miskin, bahkan ketika dihadapkan dengan produksi dalam negeri, masyarakat cenderung memilih produk buatan luar negeri. Lalu bagaimana jika diberlakukannya MEA di Indonesia?, salah satu pengelola BMT Sinar Surya Makassar mengatakan bahwa:

“Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka negara-negara ASEAN khususnya yang tergabung dalam anggota MEA dapat menjalin kerjasama yang lebih baik, khususnya dalam bidang perekonomian demi terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat.”⁷²

Pemberlakuan MEA di Indonesia sebenarnya memberikan peluang yang bagus untuk membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan dapat membantu menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, namun yang menjadi

⁷²Andi Rafikatul Kamal, Pengelola BMT (Wawancara, 25 tahun), BMT Sinar Surya Makassar Jl. Paropo II No. 5 Makassar, 27 November 2015.

kendala, sanggupkah Indonesia khususnya di kota Makassar dalam lembaga keuangan mikro seperti BMT bertahan untuk menghadapi MEA?

Dalam menyongsong MEA, pemerintah harus membuat persiapan yang matang dan kebijakan melindungi kepentingan masyarakat, untuk itu pemerintahan Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang dapat mendorong terjadinya peningkatan daya saing bagi produk barang dan jasa Indonesia. Dan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk bersaing dalam menghadapi MEA pada sektor *microfinance* adalah BMT.

Peran koperasi syariah dalam wujud *Baitul maal waa Tanwil* (BMT) di Makassar sangat strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, peran koperasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim wirausaha dan sekaligus berperan dalam melakukan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Meski peran BMT sangat strategis bagi pembangunan, tapi selalu saja BMT dihadapkan dengan permasalahan yang menjadikan mereka sulit untuk berkembang dengan pesat, apalagi dengan kebijakan liberalisasi ekonomi yang dijalankan selama ini dengan mekanisme pasar bebas, BMT merasa tertatih-tatih dan sulit untuk berkompetisi dalam menghadapi realitas tersebut.

Contoh permasalahan yang dihadapi BMT adalah masalah perkuatan permodalan, sumber daya manusia, regulasi, pemasaran dan teknologi IT, hal ini yang menjadikan BMT di Makassar kurang memiliki daya saing di bandingkan dengan BMT di kota-kota lain. Dalam hal permodalan, akses BMT di Makassar sangat rendah hal ini dikarenakan banyak pelaku BMT minim permodalan sementara

anggota sangat banyak dengan demikian fungsi BMT sebagai intermediasi keuangan kepada para anggotanya sangat minim sekali. Minimnya pembiayaan yang disalurkan kepada para anggota inilah yang menjadikan BMT tidak maksimal dalam melakukan intermediasi kepada para anggotanya sehingga seringkali BMT mengalami jalan di tempat. Kemudian dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM), pelaku BMT sangat rendah, mereka masih otodidak dan tidak ada arah pengetahuan bisnis yang kuat hal ini disebabkan faktor pendidikan dan minimnya pendampingan kepada mereka. Apalagi dalam menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN standarisasi profesionalisme pelaku BMT nyaris tidak ada sama sekali. Maka perkuatan sumber daya manusia bagi pelaku koperasi terus digalakkan sehingga pelaku BMT benar-benar profesional dan siap bersaing dengan negara-negara lain apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

BMT adalah sebuah lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. BMT tidak digerakkan dengan laba semata, tetapi juga motif sosial karena beroperasi dengan pola syariah. Maka dari itu BMT hadir sebagai opsi dan bukan solusi untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi MEA. Sebagaimana yang di ungkapkan salah satu pengelola BMT Sinar Surya bahwa:

“BMT ini hadir sebagai opsi untuk masyarakat yang ingin melakukan simpan pinjam ataupun kredit yang dalam Islam lebih dikenal dengan pembiayaan dan bukan solusi, karena ada banyak lembaga keuangan mikro lain dan BMT ini hanya salah satunya.”⁷³

BMT tidak ada lagi sistem suku bunga, produsen bisa memilih dan membeli bahan berkualitas untuk membuat produk baru sehingga produk yang dihasilkan bisa bersaing dengan produk luar. BMT ini khas Indonesia, karena BMT bisa menggabungkan prinsip koperasi dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. BMT memiliki semangat koperasi khususnya semangat gotong-royong, dan bila BMT berhasil membuat terobosan ke depan, maka akan banyak sekali kemajuan yang dibuat. Salah satu anggota BMT Sinar Surya mengatakan:

”BMT bisa membantu masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan secara baik. Bahkan dalam simpan pinjam di BMT bagi hasil yang ditawarkan bukan bunga.”⁷⁴

Karena itu, proses pinjaman harus diatur dengan baik supaya tidak merugikan pihak-pihak terkait. Selain itu, kelola keuangan yang ada di daerah harus ditata dengan baik. Prinsip dasar BMT harus tetap dikembangkan, beberapa prinsip dasar tersebut meliputi memiliki sumber daya yang memadai sebagai lembaga usaha, bersedia mengikuti semua peraturan baik secara industri maupun regulasi pemerintah, sebagai bekal mengelola dengan prinsip yang baik dan benar. Selain tentu ada aturan syariah yang dipegang sebagai jalan mengagungkan syiar Islam.

⁷³Nurhayati, Pengelolah BMT Sinar Surya Makassar (Wawancara, 48 tahun), BMT Sinar Surya Makassar, Jl. Paropo II No. 50 Makassar, 27 November 2015.

⁷⁴Khairul, Anggota BMT Sinar Surya Makassar (wawancara 27 tahun) . Jl. Paropo 2 Makassar.

BMT mampu bergerak dengan leluasa, karena BMT memiliki kelenturan dalam bergerak, dan diberikan keleluasaan agar mereka bisa bergerak di bawah, dan itulah kekuatan BMT pada umumnya. Dengan manajemen yang baik maka BMT akan berjalan dengan baik pula dan mampu bersaing di tengah-tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), seperti apa yang telah diungkapkan oleh salah satu anggota dari BMT Sinar Surya Makassar:

“BMT akan mampu bersaing selama orang-orang bergerak di bidang itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan konsep yang sudah ditetapkan, karena menurut saya konsep dari BMT itu sudah sangat baik tetapi kita kembalikan lagi kepada individual yang menjalankannya.”⁷⁵

Namun studi kasus kali ini pada BMT Sinar Surya Makassar, peneliti menemukan hal lain yang berbeda dari pendapat-pendapat sebelumnya, BMT Sinar Surya Makassar belum sanggup bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), seperti apa yang diungkapkan oleh salah satu pengelola BMT Sinar Surya Makassar: “Kalo untuk persaingan di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) BMT kami (Sinar Surya Makassar) masih agak susah.”⁷⁶

Kendala yang dihadapi BMT Sinar Surya Makassar dalam menghadapi MEA adalah pada dana yang belum mampu memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar sehingga belum mampu untuk menghasilkan produk-produk yang unggul untuk bersaing di tengah-tengah MEA. Dana yang dikumpulkan juga masih dari pengurus

⁷⁵Karman Karim, Anggota BMT Sinar Surya Makassar (Wawancara, 45 tahun), Paropo II Makassar, 27 November 2015.

⁷⁶Nurhayati, Pengelola BMT Sinar Surya Makassar (Wawancara, 48 tahun), BMT Sinar Surya Makassar, Jl. Paropo II No. 50 Makassar, 27 November 2015.

dan penabung, selain itu pinjaman dari bank, seperti apa yang dikatakan oleh manager di BMT Sinar Surya Makassar:

“Kendala pada dana belum mampu memberikan pinjaman di atas 50 juta rupiah. Dan dananya dari pengurus dan penabung, selain itu pinjaman dari Bank.”⁷⁷

Target BMT Sinar Surya Makassar adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan anggota dari BMT Sinar Surya Makassar itu sudah hampir seluruh masyarakat Paropo hingga ke Antang. BMT Sinar Surya menerima jasa pelayanan berupa pembayaran token listrik, air PDAM dan penjualan pulsa elektrik.

Berdasarkan apa yang telah diteliti, penulis berpendapat bahwa secara umum BMT di Makassar mampu bersaing di tengah-tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) asalkan mampu memantaskan diri dalam persaingan MEA dengan menghasilkan produk-produk yang inovatif dan kreatif, selain itu sumber daya manusianya harus selalu di berikan pelatihan mengenai pengelolaan BMT yang baik dan benar agar mampu bersaing di tengah masyarakat ekonomi ASEAN. Namun pada studi kasus BMT Sinar Surya Makassar kenyataannya belum mampu bersaing di tengah-tengah MEA dikarenakan beberapa kendala, salah satunya adalah kendala pada dana.

⁷⁷Nurhayati, Pengelolah BMT Sinar Surya Makassar, (wawancara, 48 tahun), BMT Sinar Surya Makassar Jl. Paropo II No. 5 Makassar, 27 November 2015.

C. Analisis Data Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada halaman sebelumnya, MEA merupakan tempat daya saing yang bebas, dan hal ini akan menjadi peluang besar bagi sistem ekonomi Islam, karena daya saing yang bebas, kelancaran arus barang dan produk dikarenakan tarif *non-tarif* sudah tidak diberlakukan lagi. Selain itu ekonomi Islam bebas mengalirkan modal yang ditawarkan oleh produk-produk lembaga keuangan syariah secara global di tengah-tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tanpa adanya bunga atau dengan kata lain riba.

BMT dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) akan tetap mampu bergerak leluasa, dan bergerak pada masyarakat ekonomi menengah dan ekonomi bawah. Dan untuk tetap menjaga eksistensinya bersaing di MEA dan memenangkan pasar bebas MEA, salah satu yang harus dilakukan BMT adalah melakukan inovasi produk, sistem bagi hasil, dan produk yang kompetitif, agar menjadi daya tarik bagi BMT itu sendiri, selain itu sumber daya manusianya harus terampil dan mengetahui dengan betul cara pengelolaan dan manajemen dengan baik dan benar. Dengan manajemen yang baik maka BMT akan berjalan dengan baik pula dan mampu bersaing di tengah-tengah MEA sebagaimana diungkapkan oleh Karman pada halaman 68.

BMT hadir sebagai opsi bukan solusi untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi MEA sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Nurhayati salah satu pengelola BMT Sinar Surya Makassar pada halaman 67. Namun BMT Sinar Surya Makassar dalam menghadapi MEA belum mampu dan sanggup bersaing ditengah-

tengah MEA sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nurhayati salah satu pengelola dari BMT Sinar Surya Makassar pada halaman 68 bahwa kalau untuk persaingan di tengah MEA, BMT kami masih agak susah. Kendala yang dihadapi BMT Sinar Surya Makassar untuk bersaing di tengah-tengah MEA adalah jumlah dana. BMT Sinar Surya Makassar belum mampu memberikan jumlah dana yang besar sehingga belum mampu untuk menghasilkan produk-produk unggul yang mampu dijadikan daya saing dalam menghadapi MEA. Jadi pada kesimpulannya BMT Sinar Surya Makassar belum mampu memperlihatkan eksistensinya ditengah-tengah Masyarakat ekonomi ASEAN.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penjelasan segala hal tentang MEA pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN termasuk Indonesia yang telah menjalin kerjasama dan kontrak kerja dalam bidang perekonomian untuk memajukan dan menambah pertumbuhan ekonomi nasional.

BMT merupakan opsi bukan solusi untuk MEA, BMT dapat bersaing dan bertahan di tengah-tengah MEA asalkan memiliki produk-produk yang unggul, inovatif, dan kreatif dan dapat bersaing dengan produk-produk negara lain.

Pada studi kasus BMT Sinar Surya Makassar, kesimpulannya BMT tersebut belum mampu bersaing di tengah-tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dikarenakan beberapa kendala, termasuk kendala pada dana, dan belum sanggup untuk memberikan pinjaman dengan jumlah yang besar. Target dari BMT Sinar Surya Makassar itu adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

B. Saran-Saran

Penulis mempunyai beberapa saran untuk pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Untuk pemerintah agar lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan membantu dalam pengembangannya terutama pada sektor mikro khususnya pada BMT Sinar Surya Makassar, agar BMT Sinar Surya Makassar dapat

meningkatkan kualitas produk-produknya sehingga dapat bersaing di tengah masyarakat ekonomi ASEAN.

2. Untuk BMT Sinar Surya agar lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk-produknya, menginovasi produk-produknya, meski dengan dana yang minim, sehingga dapat bertahan dan bersaing secara sehat dalam pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2009. Dasar-dasar Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Aisyah, Ly Fairuzah. 2011. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Busana Muslim: Studi pada CV.Azka Syahrani Collection. *Skripsi*. Jakarta: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Alamsyah, Halim. 2012. perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia : tantangan dalam menyongsong MEA 2015. *Makalah yang disampaikan pada seminar Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)*.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- al-kaaf, Abdullah zaky. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, Cet-1.
- Annonimus, 2011. *Undang-Undang RI tentang Perbankan syariah*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Damsar, 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet -1.
- Departemen Agama Revublik Indonesia, 2007. *Pedoman pembukuan dan Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Islam pada Perguruan Tinggi Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet 1.
- Direktorat jenderal kerjasama ASEAN, 2010. ASEAN Selayang Pandang. *Artikel*. Edisi ke-19.

- Evienia, Benedicta. dkk. 2014. “pandangan pelaku pendidikan terhadap pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN 2015”. *Jurnal ekonomi*. volume 18, nomor 2.
- Faisal, Sanafia, 2001. *Format-format penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. V.
- fhatoni, Hakim M. 2013. ASEAN Community 2015 dan Tantangannya Pada Pendidikan Islam di Indonesia. *Laporan Penelitian Individual*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Ampel.
- Hayat, 2014. “Globalisasi perbankan Syariah : tinjauan teoritis dan praktis dalam menghadapi MEA 2015”. *Jurnal studia Islamika*. Volume 11, Nomor 2.
- Hamdan, 2012. “Baitulmal wattamwil dan BPR”. *Jurnal Diklat III Program PPC Terpadu Angkatan VI Peradilan Agama Seluruh Indonesia*. Bogor: Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Megamendung.
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia.
- Hermana, Budi. dkk, Lembaga Keuangan Mikro: Model Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, *Jurnal*. Universitas Gunadarma.
- <http://www.puskopsyahlampung.com/2013/05/perkembangan-bmt-dari-tahun-ke-tahun.html>. (diakses tanggal 30 september 2015).
- Kadir, Amiruddin. 2011 *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Makassar: Alauddin University Press, Cetakan 1.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33.*
- Lubis, Suhrawardi K. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan. III.

- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Muhsin, Sulaiman Thahir Abdul. 1985. *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan 1.
- Purnama, Achmad Rizal, 2000 Menuju Sistem Ekonomi Islam. *Makalah Seminar*. "Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam". Depok: Universitas Indonesia.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*, (Mesir: 1376 H, Dar al-Manar), Jilid III.
- Rohmah, Elly Nur. 2010. Respon Masyarakat Muslimin Mengenai Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Respon Kyai dan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. *Skripsi*. Semarang: Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Saifuddin, Ridwan. 2008. Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Lembaga Keuangan Mikro studi kasus BMT di Kota Lampung. *Skripsi*. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Karta Saputra, 1985. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Saleh, Ismail. 2012. Urgensi Mempelajari Ekonomi Islam. *Skripsi*. Semarang: Universitas di Ponegoro.
- Sholihuddin, Muhammad. 2011. "Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal ekonomi*. volume 1, nomor 1.

Sopanah. 2011. Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sebuah Studi Interpretif. SNA XIII Purwokerto.

Srikandi,Rahayu.2014.*PengertiandanKarakteristik*<http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/08/pengertian-karakteristik-masyarakat-ekonomi-ASEAN.html>. (diakses 30 Juli 2015).

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV.Alfabeta, 2008.

Surya pos, *Pengertian Ekonomi Islam*,<http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam-html>. (diakses 30 juli 2015).

Syabi,Keane. *Pengertian-dan Karakteristik MEA*, www.academia.edu/9060383/masyarakat-ekonomi-ASEAN-2015 MEA-2015. html. 2014. diakses 30 Juli 2015.

Syibli, M. Roem, 2008. Filosofi dan Rasional Ekonomi Islam dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah. *Artikel*. Yogyakarta: Safiria Insani Press.

Wangke, Humphrey. 2014. peluang Indonesia terhadap masyarakat ekonomi ASEAN. *Jurnal hubungan internasional*, volume 6, nomor 10.

Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, Cet 1.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ifa Musdalifah, lahir di Kabupaten Bulukumba Desa Batukaropa pada tanggal 21 September 1994 merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Bapak Mustafa dan Ibu Hj. Nurliati S.Pd. adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 1999 lulus dari TK Bina Sejahtrah Batukaropa. Kemudian melanjutkan di SDN 88 batukaropa hingga kelas IV kemudian pindah pada SDN 89 Batukaropa dan lulus tahun 2005. Pada tahun 2008 lulus dari SMPN 2 Palampang dan melanjutkan ke SMAN 1 Rilau Ale yang sekarang sudah berganti nama menjadi SMAN 10 dan lulus tahun 2011. Setelah itu melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan ekonomi Islam, pada semester akhir tahun 2016 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksistensi BMT di Tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus Pada BMT Sinar Surya Makassar)”.